

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari keseluruhan tanggapan, sarana dan prasarana yang ada dan telah dilakukan oleh SMP PL Domenico Savio Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa pembudayaan hukum di SMP PL Domenico Savio Semarang bersifat budaya hukum yang partisipan karena cara berpikir komunitasnya berbeda-beda masih ada yang berbudaya takluk tetapi hampir semua informan sudah merasa mempunyai kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam menilai setiap peristiwa hukum karena menyangkut kepentingan anak disekolah maupun kepentingannya sendiri.
2. Tanggapan komunitas SMP PL Domenico Savio mengenai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan hampir seluruhnya menerima. Namun, ada juga yang menolak. Hal ini membuktikan bahwa cara berpikir komunitas SMP PL Domenico Savio berbeda-beda. Penerimaan disini peneliti kategorikan sebagai bentuk partisipasi komunitas SMP PL Domenico Savio terhadap

Permendikbud, karena ketika informan menerima artinya informan mengerti fungsi dari Permendikbud ini.

3. Sarana dan prasarana yang disediakan dalam rangka penerimaan Permendikbud ini:

- a. SMP PL Domenico Savio Semarang mempunyai pedoman perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak berupa Kode Etik Perlindungan Terhadap Kekerasan Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Pendidikan Yayasan Pangudi Luhur.
- b. SMP PL Domenico Savio Semarang telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Kepolisian.
- c. SMP PL Domenico Savio telah membentuk tim kedisiplinan.
- d. SMP PL Domenico Savio telah memfasilitasi peserta didik dengan memberikan perlindungan hukum.
- e. SMP PL Domenico Savio telah memberikan rehabilitasi kepada peserta didik setiap kali ada kasus perundungan/*bullying*.

Budaya hukumnya partisipan terbatas, karena walaupun komunitas SMP PL Domenico Savio telah berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarananya namun ternyata sampai saat belum seluruhnya dilakukan sesuai yang diwajibkan dalam Permendikbud.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Sekolah

1.1 Jika sudah dilakukan sosialisasi mengenai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, diharapkan agar sekolah tidak lambat dalam merespon produk-produk hukum.

1.2 Tim kedisiplinan seharusnya terdiri dari Kepala Sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orangtua/wali agar terpenuhi unsur-unsur yang diwajibkan dalam Permendikbud.

1.3 Pemasangan papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan sebaiknya ada, agar sarana dan prasarana yang disediakan oleh SMP PL Domenico Savio memenuhi kriteria Permendikbud.

2. Bagi Pihak Pemerintah

2.2 Perlu diadakan sosialisasi khusus mengenai isi dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan agar sekolah-sekolah yang ada dalam lingkup pengawasan Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat

menanggulangi dan mencegah terjadinya *bullying* sesuai dengan aturan yang ada.

2.2 Apabila sekolah sudah melaksanakan Permendikbud ini perlu dilakukan pengawasan secara berkala. Sedangkan, untuk sekolah yang belum melaksanakan Permendikbud ini agar mendapat perhatian dengan cara didukung dan dibina. Selanjutnya, kepada sekolah yang enggan melaksanakan Permendikbud ini perlu diberi sanksi yang tegas.

